

ABSTRAK

- (A) Nama : Christian Sutanto (205170113)
- (B) Judul Skripsi: **“Urgensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 Dilihat dari Tujuan Pidanaan**
- (C) Halaman : vii + 89 + 2021.
- (D) Kata Kunci : Urgensi, Pemberian Asimilasi, Hak Integrasi, Narapidana.
- (E) Isi Abstrak
Kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi Covid-19. Kebijakan asimilasi diberikan sebagai hak narapidana setelah memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum yang berlaku. Di tengah pandemi Covid-19, penjara menjadi tempat beresiko karena banyak penjara yang tidak layak huni akibat kelebihan kapasitas. Permasalahan yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana urgensi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 dilihat dari teori tujuan pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asimilasi ditinjau dari perspektif teori pidana integratif dinilai belum sinkron karena tujuan pidana yaitu mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi pelaku dengan tetap memperhatikan HAM, dibandingkan dengan pidana penjara yang menimbulkan lebih banyak dampak negatif. Kebijakan asimilasi dalam masa pandemi Covid-19 telah sesuai dengan konsep asimilasi yakni dengan dipenuhinya persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan penerapan program asimilasi di masa pandemi Covid-19 sebaiknya disertai dengan kebijakan hukum yang dampaknya dapat bermanfaat bagi sistem hukum di Indonesia terutama mengenai kebijakan kriminal yaitu melalui rekonstruksi dan/atau reformulasi sistem pidana dan sanksi pidana melalui penerapan sanksi pidana kerja sosial dan pencegahan dan/atau penanggulangan kejahatan melalui upaya *restorative justice* dan hal tersebut menjadi pertimbangan sebagai suatu upaya untuk menyelesaikan permasalahan *over capacity*. Terkait dengan narapidana yang kembali melakukan tindak pidana setelah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19 perlu mendapat tindakan tegas dari pemerintah dengan pemberatan hukuman dan tak terkalah penting dilakukan pengawasan oleh Bapas. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik, diantaranya dengan komunikasi melalui video *conference* dan grup *line/whatsapp* agar program asimilasi dan integrasi tetap berjalan dengan baik
- (F) Acuan : 71 (1958-2021)
- (G) Pembimbing : Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Christian Sutanto